

**ANALISIS STRATEGI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TANJUNGPINANG
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Oleh

**Deka Harmadya Sandi¹,
Sampara Lukman², Megandaru Widhi Kawuryan³**

¹⁾ Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri
harmadya@gmail.com

^{2,3)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

Since 2016 the Tanjungpinang City Culture and Tourism Office has intensified the increase in tourist arrivals, which tends to increase from 211,065 people in 2016 to 338,625 in 2018, but in terms of revenue and retribution fluctuations occur. This research is intended to analyze how the strategy of the Tanjungpinang City Culture and Tourism Office in increasing the Tanjungpinang City Original Revenue in 2019 has not been realized optimally and what strategic steps are taken by the Tanjungpinang City Culture and Tourism Office in optimizing the intended strategy.

This analysis method uses Bryson's (2007) analysis, First, Initiating and agreeing on a strategic planning process. second, identifying the organizational mandate. third, clarity of mission and organizational values. Fourth, conduct an assessment of the external environment. Fifth, conduct an assessment of the internal environment. Sixth, identify strategic issues facing the organization. Seventh, Formulating strategies to manage strategic issues. Eighth, establishing an effective and efficient organizational vision. the analysis shows that the findings of the research are still many opportunities and threats that have not been identified and escaped from the observation of the organization. Such as weak promotion by utilizing information technology and stakeholder involvement

Keywords: *strategy, increasing, revenue, Tanjungpinang, Bryson*

ABSTRAK

Sejak 2016 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang telah melakukan intensifikasi dalam meningkatkan kunjungan wisatawan yang cenderung meningkat dari 211.065 orang pada 2016 menjadi 338.625 pada 2018, Namun dari sisi pendapatan dan retribusi terjadi fluktuasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 yang belum terealisasi secara optimal dan langkah-langkah strategis apa yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam optimalisasi strategi yang dimaksud.

Metode analisis ini menggunakan analisis Bryson (2007), Pertama, Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis. kedua, mengidentifikasi mandat organisasi. ketiga, kejelasan misi dan nilai-nilai organisasi. Keempat, melakukan penilaian terhadap lingkungan eksternal. Kelima, melakukan penilaian terhadap lingkungan internal. Keenam, mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi. Ketujuh, Merumuskan strategi untuk mengelola isu strategis. Kedelapan, menetapkan visi organisasi yang efektif dan efisien. hasil analisis menunjukkan bahwa hasil temuan penelitian masih banyak peluang dan ancaman yang belum diidentifikasi dan luput dari pengamatan organisasi. Seperti lemahnya promosi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan keterlibatan stakeholder.

Kata kunci: strategi, meningkatkan, pendapatan, Tanjungpinang, Bryson

PENDAHULUAN

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan pariwisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah . Sektor pariwisata diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluruhnya. Pengembangan sektor pariwisata seyogianya merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural.

Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Di samping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijakan pemerintah untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Dalam pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan alokasi ruang guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Usaha Pariwisata Kota Tanjungpinang dijelaskan bahwa dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan usaha kepariwisataanyangmempunyaiartistrategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya dapat mendorong peningkatan

lapangan kerja, pertumbuhan investasi serta pelestarian budaya bangsa sehingga Pemerintah Kota Tanjungpinang perlu melakukan pembinaan dan pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap usaha kepariwisataan di Wilayah Kota Tanjungpinang .

Maka dari itu pemerintah Kota Tanjungpinang harus melakukan beberapa strategi agar semua usaha pariwisata dapat dikembangkan dan dapat menarik wisatawan. Selain wisata pantai dan bahari, Kota Tanjungpinang juga memiliki objek wisata lainnya seperti cagar budaya, makam-makam bersejarah, tarian-tarian tradisional serta event-event khas daerah . Di Kota Tanjungpinang terdapat Pulau Penyengat sebagai pulau bersejarah karena di pulau ini terdapat masjid bersejarah dan makam-makam Raja Haji Fisabilillah dan Raja Ali Haji yang kedua-duanya adalah pahlawan nasional.

Salah satu keunikan dari Kota Tanjungpinang bahwa di kota Tanjungpinang tersebar cagar budaya yang diharapkan mampu menarik wisatawan. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan .

Hal ini sangat membutuhkan peran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang untuk dapat mempromosikan daerah wisata daerah yang dapat menarik wisatawan asing untuk dapat berkunjung ke Tanjungpinang yang nantinya dapat meningkatkan angka kunjungan wisata pada setiap tahunnya.

Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang harus memiliki strategi dalam mengembangkan wisata di Kota Tanjungpinang sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan pajak sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan serta pajak agen-agen penyelenggara wisata tours dan travel, di mana strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh masyarakat atau wisatawan pada masa depan.

Pada 2016 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang merancang kerja sama yang lebih intensif untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Perusahaan travel dan pengelola hotel akan membantu mempromosikan objek budaya di Tanjungpinang.

Meskipun pada 2017, tingkat kunjungan wisatawan ke Tanjungpinang tidak memenuhi target, namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang menaikkan target kunjungan wisatawan tahun 2018 mencapai 110 ribu orang. Strategi yang dilakukan adalah mengusahakan target dapat terpenuhi melalui berbagai event yang dapat menarik wisatawan, baik dari luar daerah maupun luar negeri, sehingga dapat menjadi daya tarik dan tujuan bagi wisatawan untuk berkunjung ke

Tanjungpinang. Selain pelaksanaan event, hal utama yang akan dilakukan memenuhi target 2019 mendatang dengan perbaikan dan pengembangan potensi yang telah ada. Beberapa perbaikan seperti fasilitas umum sebagai salah satu poin besarnya.

Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya investasi di Tanjungpinang, membangun potensi sektor pendapatan reklame yang juga cenderung meningkat, ini merupakan salah satu potensi. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pendapatan daerah dari sektor pariwisata sangat besar di mana yang bersumber dari hotel, restaurant maupun hiburan dan bahkan lebih unggul dibandingkan dengan pajak pendapatan daerah dari sektor lain dari total pendapatan daerah dari sektor pajak sebesar RpRp61.711.672.182 pada 2018, 23% merupakan kontribusi dari pajak pariwisata, yaitu sebesar Rp14.484.467.717 Tahun 2017 25% merupakan kontribusi dari sektor pariwisata, yaitu total pendapatan sebesar Rp61.400.579.533, yaitu sebesar Rp 15.147.870.627 sedangkan pada 2018 total pendapatan dari sektor pariwisata sebesar Rp53.830.535.986, 24% memengaruhi, yaitu sebesar Rp13.093.674.354.

Berdasarkan total jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak, pendapatan dari sektor pariwisata mengalami penurunan pada 2018, yang mana dikarenakan penurunan jumlah kunjungan wisatawan asing pada 2018 maka persentase pendapatan dari sektor pariwisata juga mengalami penurunan. Dengan besarnya pendapatan dari sektor pariwisata maka akan jelas sangat memengaruhi di dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang. Namun pada pelaksanaan Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang terdapat beberapa gejala permasalahan.

Belum profesionalnya sebagian besar pengelolaan objek wisata yang ada di Kota

Tanjungpinang seperti pengelolaan potensi wisata religi dan budaya di Pulau Penyengat dan Senggarang, pantai Tanjung Siambang Pulau Dompok sehingga pengelolaannya masih bersifat individu dan cenderung belum dikelola dengan manajemen yang baik sehingga tidak ada potensi penarikan pajak dari objek wisata tersebut, seharusnya hal tersebut dapat dimanfaatkan dengan bijak khususnya oleh pemerintah daerah Kota Tanjungpinang agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak objek wisata tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mencari atau melihat strategi yang perlu dilakukan dalam upaya pengembangan sektor pariwisata Kota Tanjungpinang. Strategi ini dicari sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber penghasil Pendapatan Asli Daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah. Strategi ini diharapkan dapat menjadikan sektor pariwisata sebagai penyumbang yang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang. Masih minimnya kegiatan promosi tempat wisata yang ada di Kota Tanjungpinang baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah-masalah dalam penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019?
2. Apa faktor-faktor penghambat Dalam Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019?

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana Strategi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 belum terealisasi secara optimal dan langkah-langkah strategis apa yang dilakukan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam optimalisasi strategi yang dimaksud. Bertitik tolak dari fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk Menganalisis Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019.
2. Untuk Menganalisis faktor-faktor penghambat dalam Strategi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019

LANDASAN TEORETIS

Definisi pemerintahan menurut W.S Sayre (1960) pemerintah merupakan organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter (1977), menjelaskan definisi pemerintah sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari sekelompok orang yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan melakukan kegiatan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. Definisi ini menggambarkan bahwa pemerintah dalam mempertahankan sistemnya dapat menggunakan kekuasaan yang cenderung memaksa, sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam mengatur seluruh anggota masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan definisi tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan

rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. selanjutnya Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Strategi adalah sekumpulan pilihan kritis untuk perencanaan dan penerapan serangkaian rencana tindakan dan alokasi sumber daya yang penting dalam mencapai tujuan dasar dan sasaran, dengan memperhatikan keunggulan kompetitif, komparatif dan sinergis yang ideal berkelanjutan sebagai arah, cakupan dan perspektif jangka panjang keseluruhan yang ideal dari individu atau organisasi.

Menurut George A. Steiner, (2007:18) Secara khusus, strategi adalah penempatan misi organisasi, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Berdasarkan definisi di atas maka strategi organisasi adalah suatu kebijakan dasar organisasi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Peranan yang dimainkan oleh strategi tersebut adalah sebagai penentu arah yang harus ditempuh oleh organisasi yang bersangkutan.

Menurut Bryson (2007) perencanaan strategis bagi organisasi nonprofit dalam hal ini pemerintah daerah, Langkah-langkah ini menyesuaikan dengan arah implementasi, input, output dan proses evaluasi. Hal-hal tersebut perlu diupayakan diusahakan ada dalam setiap langkah atau tahapannya. Sehingga proses evaluasi menjadi

kesatuan sistem perencanaan strategis yang dilakukan secara terus menerus. langkah-langkah di atas dapat dijabarkan di antaranya:

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis
Pembicaraan atau diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama pihak-pihak berkepentingan yang terlibat langsung (baik stakeholder internal maupun eksternal) dalam membuat keputusan.
2. Identifikasi mandat organisasi
Merupakan kemampuan Organisasi dalam mengetahui dengan jelas dan harus bisa mendefinisikan nilai-nilai dan misi dari organisasi bersangkutan. Persyaratan ini diterjemahkan ke dalam hukum, undang-undang, pasal-pasal tentang organisasi, sehingga dapat menemukan dan memperjelasnya
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi
Perencanaan strategis adalah mengenai tujuan, makna, nilai dan kebajikan, dan di mana pun tak ada yang lebih nyata selain klarifikasi misi dan pengembangan visi keberhasilan (Bryson, 2007:113).
4. Penilaian terhadap lingkungan eksternal
Penilaian terhadap analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengkaji atau internal organisasi agar menemukan kekuatan, kelemahan yang ada, berbagai hal yang mampu mendorong atau menghalangi upaya dalam mencapai tujuan dari organisasi dan upaya dari pencapaian tugas dan fungsinya (Andika dkk., 2018).
5. Penilaian terhadap lingkungan internal
Penilaian terhadap analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengkaji atau internal organisasi agar menemukan kekuatan, kelemahan yang ada, berbagai hal yang mampu mendorong atau

menghalangi upaya dalam mencapai tujuan dari organisasi dan upaya dari pencapaian tugas dan fungsinya (Andika dkk., 2018).

6. Identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi

Adalah melakukan keputusan dari berbagai pilihan yang berkaitan dengan tahapan perencanaan strategis yang dilakukan pada periode sebelumnya selanjutnya pengambil kebijakan harus sepakat tentang isu strategis yang akan diselesaikan berdasarkan urutan prioritas, logis atau temporal.

7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu strategis

Adalah sebuah kegiatan perumusan strategi dimulai dari penyusunan draft, masukan pimpinan hingga pemeriksaan rencana strategis yang juga dilakukan oleh pimpinan.

8. Penetapan visi organisasi yang efektif dan efisien.

Kegiatan melakukan penetapan visi organisasi yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah pada periode tersebut

Menurut Mardiasmo (2006:12) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah .

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan serta dipungut oleh pemerintah daerah (daerah otonom) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan atas kewenangan yang dimiliki. Menurut Rochmat Soemitro dalam Kaho (2002:5), pajak daerah adalah sebagai berikut : "Pajak lokal atau pajak daerah adalah pajak yang

dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti provinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya". Siagian dalam Kaho (2002:5) merumuskan pengertian pajak daerah adalah sebagai berikut "Pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan dinyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang".

Pendapatan asli daerah menurut Suparmoko (2012:344) merupakan pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah . Jadi pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali dana di daerahnya masing-masing guna pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Berdasarkan konsep di atas dapat dianalisis bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh dari daerah yang berasal dari Pajak daerah, pajak daerah, bagian laba dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas dan pendapatan lain-lain yang merupakan sumber pendapatan murni daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif, di mana Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menemukan teori di lapangan. Berdasarkan uraian di atas, pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan agar peneliti dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif mengenai penyebab pembiasaan . Menurut Strauss dan Corbin (1990) dalam Pardede (2009:5) mengemukakan : bahwa pendekatan teori dasar adalah suatu metode penelitian kualitatif yang menggunakan prosedur sistematis untuk mengembangkan teori secara induktif yang memperoleh teori dasar. Penelitian ini juga bertujuan membangun

teori yang dapat dipercaya dan menjelaskan wilayah di bawah studi. Tujuan umum dari penelitian dasar ini, yaitu secara induktif memperoleh data, diperlakukan untuk pengembangan teoretis, dan diputuskan secara memadai untuk domainnya dengan memperhatikan sejumlah kriteria evaluatif.

Konsep operasional adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur variabel agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan untuk kesamaan pikiran dalam analisis. Untuk lebih terarahnya penelitian yang dilakukan di lapangan maka perlu dikemukakan kerangka penelitian yang dapat membantu dalam proses pelaksanaan penelitian. Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian adalah: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah strategi yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata Kota Tanjungpinang yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) Kota Tanjungpinang. Harapan dalam peningkatan PAD ini salah satunya dilakukan melalui pengembangan sektor pariwisata, untuk itu diperlukan konsep analisis strategi atas apa yang diupayakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang yang meliputi:

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis
2. Identifikasi mandat organisasi
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi
4. Penilaian terhadap lingkungan eksternal
5. Penilaian terhadap lingkungan internal
6. Identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi
7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu strategis

8. Menetapkan suatu Visi Organisasi yang efektif pada masa depan

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data Primer dan data Sekunder. Data Primer adalah data yang diambil langsung dari informan, yaitu mengenai Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang yang meliputi beberapa dimensi di antaranya :

1. Upaya yang dilakukan dalam memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis
2. Upaya yang dilakukan dalam mengidentifikasi mandat organisasi
3. Upaya yang dilakukan dalam memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi
4. Upaya saat melakukan penilaian terhadap lingkungan eksternal
5. Upaya saat melakukan penilaian terhadap lingkungan internal
6. Upaya dalam mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi
7. Upaya dalam merumuskan strategi untuk mengelola isu strategis
8. Upaya dalam menetapkan suatu Visi Organisasi yang efektif pada masa depan

Data Sekunder merupakan data informasi dan keterangan lainnya yang telah diolah lebih lanjut yang disajikan melalui dokumen, buku-buku maupun dokumentasi, yaitu berupa foto/gambar yang berkaitan dengan penulisan. Kemudian dokumen tersebut berisikan: Sejarah berdirinya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, struktur organisasi, visi-misi serta tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang yang sudah tersedia yang menunjang dan berkaitan dengan masalah penelitian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan pada kajian mengenai peningkatan strategi dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menunjang Pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019, maka diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut.

1) Tahapan strategi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, sesuai Tahapan Bryson, disimpulkan sebagai berikut. indikator pertama, telah melibatkan stakeholder baik itu di pihak pemerintah maupun pihak swasta seperti ASITA Tanjungpinang, LAM, Pengelola Objek Wisata, Kelompok Sadar Wisata, dan asosiasi lainnya. Namun masih perlu ditingkatkan partisipasi perangkat daerah pendukung baik Dinas perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman baik tingkat Kota Tanjungpinang, Provinsi maupun Kementerian. Kedua, bahwa mandat formal maupun informal dapat dijabarkan secara jelas dalam kedudukan organisasi, struktur perangkat daerah tipologi A, sistematika rencana strategis.. Ketiga, secara formal sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 memiliki tugas menjalankan misi kedua dan misi ketiga Walikota Tanjungpinang. visi misi RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang difokuskan pada peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan kapasitas pengembangan budaya local serta peningkatan usaha berbasis ekonomi kreatif. Indikator keempat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang dinilai belum dilakukan secara optimal mengingat berdasarkan hasil temuan penelitian masih banyak peluang dan ancaman yang belum diidentifikasi dan

luput dari pengamatan organisasi. Seperti lemahnya promosi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan keterlibatan stakeholder terkait. Indikator kelima, belum dilakukan secara optimal, perlu dilakukan analisis dan identifikasi, serta evaluasi yang lebih mendalam terutama yang memfokuskan aspek inputs, process dan outputs. Keenam, indikator identifikasi isu-isu strategis organisasi diperoleh beberapa isu strategis, sesuai dengan harapan pelaku kepariwisataan, dan sangat berharap tindak lanjut atau rencana aksi dari isu tersebut. Indikator ketujuh, pada analisis SWOT memberikan gambaran Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman terhadap potensi wisata Kota Tanjungpinang di mana berbagai komponen tersebut memberikan gambaran sebagai instrument analisis mengelola isu-isu strategis dalam memilih alternatif strategi. Alternatif strategi yang didapat, yaitu alternatif strategi yang bersifat agresif di Kuadran I matriks SWOT, yaitu SO. Kedelapan, indikator dalam menerapkan visi organisasi pada masa depan, harus mampu merealisasikan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, meningkatnya pelestarian, pembinaan dan pengembangan budaya local, meningkatnya usaha berbasis ekonomi kreatif dan sinergitas antara stakeholder dan pengembangan promosi berbasis teknologi informasi yang masif dan berkualitas.

2) Faktor yang menghambat perkembangan pariwisata kota tanjungpinang, masih dipengaruhi oleh kualitas SDM aparatur di lingkungan Disparbud, Pembinaan dan Pengembangan UKM, Aksesibilitas dan keselamatan transportasi umum serta Anggaran pengembangan potensi kebudayaan dan pariwisata yang cukup rendah.

SARAN

1. Pemanfaatan teknologi informasi perlu ditingkatkan melalui pelatihan SDM terampil dan fokus serta masif dalam berbagai jenis sosial media.
2. Pengembangan kelompok sadar wisata, stakeholder pemerintah lintas OPD dan hadirnya grand design pengembangan khusus kepariwisataan yang dipayungi dalam peraturan daerah, sehingga tidak terkendala dalam anggaran dan kualitas serta kuantitas SDM pada masa yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo. 2012. Metode Penelitian Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta : Ar-ruzzmedia.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Boyn, D. M., & Elison, N. B. (2007). Social network sites: Definition history and scholarship. *Journal Of Computer-Mediated Communication*, 13 (1).
- David J, Hanger & Wheelen, Thomas L. 2003. Manajemen Strategik. Yogyakarta : Andi.
- John M. Bryson, Strategic Planning For Public and Nonprofit Organizations, (United States Of America: Jossey Bass, a wiley Imprint, 2004), h. 32.
- George, Steiner A. 2007. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta : Andi.
- Hasibuan, Melayu S. P. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kaho, Josef Riwu . 2002, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi beberapa faktor yang memengaruhi penyelenggaraannya), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo, 2006. Perpajakan. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2002. Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pengawasan Pemerintahan, Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Nugroho, Riant. 2018. Kebijakan Pariwisata Sebuah Pengantar untuk Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sufian. 2005. Manajemen Administrasi Publik. Bandung : Alfa Beta.
- Suparmoko, 2012, keuangan Negara dalam teori dan praktik, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Sutanto. 2002. Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Madha University Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2004. Filsafat Pemerintahan Mencari Bentuk *Good Government* yang Sebenarnya. Jakarta : CV. Mandar maju.
- Zarella, D. (2010). The social media marketing book. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta Anggota IKAPI.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak menyebutkan pajak daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 1 ayat 3.
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Usaha Pariwisata Kota Tanjungpinang.
- Profil Badan Pengelola Pajak dan Pajak Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang 2018.
- Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang 2018.

Website:

<http://karimun.batamtoday.com/berita71028-DPRD-Tanjungpinang-Minta-Walikota-Perintahkan-Tim-Penyajian-LKPJ-Perbaiki-Data.html>“DPRD Tanjungpinang Minta Walikota Perintahkan Tim

- Penyajian LKPJ Perbaiki Data diakses pada 15 Maret 2019. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, 2019.
- Parlindungan Pardede. 2009. Penelitian *Grounded Theory* diakses melalui <http://jojoparlisda.blogspot.com/2009/01/penelitian-grounded-theory.html> pada 15 Maret 2019.
- [www.BPS Provinsi Kepulauan Riau.go. id](http://www.bpsprovinsiKepulauanRiau.go.id) diakses pada 15 Maret 2019.
- <http://Batampos.co.id> diakses pada 15 Maret 2019.
- berita di Kompasiana.com. Meningkatkan Kualitas Pariwisata di Tanjungpinang 25 Desember 2018 di unduh pada 12 Mei 2019 Pukul 14.20 wib.
- [www.Disbudpar Kota Tanjungpinang .go. id](http://www.DisbudparKotaTanjungpinang.go.id) diakses pada 15 Maret 2019.